

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan telah menimbulkan dilema dalam memaknakan kedaulatan, sedangkan gerakan menuju integrasi regional telah melahirkan identitas baru yang tidak lagi sepenuhnya menempatkan negara sebagai acuan. Politik luar negeri, yang merupakan rangkaian kebijakan yang otoritatif dari suatu negara terhadap dunia luar, dipengaruhi dan dibentuk oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. Pada era globalisasi dimana batas antar negara semakin tidak kentara, serta ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi informasi yang telah memberikan kontribusi signifikan pada terciptanya perspektif baru tentang dunia.

Perubahan dunia politik internasional dengan ditandainya runtuhnya tembok Berlin tidak merubah sikap Indonesia untuk konsisten dengan politik luar negeri yang bersifat bebas aktif, yang dicetuskan untuk menyikapi perang ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada masa Soekarno politik luar negeri Indonesia masih bersifat ideologis yang cenderung memiliki kedekatan dengan blok timur, dilihat dari gagasan Soekarno untuk membentuk poros Jakarta-Beijing- PyongYang yang tampak jelas memiliki hubungan erat dengan blok komunis. Namun pada era pasca orde lama pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif tidak lagi berorientasi pada ideologis seperti awal dicetuskannya. Perubahan terjadi pada era Soeharto politik luar negeri lebih di perioritaskan pada pembangunan ekonomi dalam negeri, dengan menggunakan instrumen diplomasi pembangunan, karena yang diprioritaskan pembangunan ekonomi, politik luar

negeri pada era ini cenderung dekat ke barat. Pada era pasca Orde Baru politik luar negeri indonesia lebih di perioritaskan pada usaha memperbaiki keadaan dalam negeri, yang mengalami krisis multidimensi. Dalam berbagai dinamika politik luar negeri indonesia tidak mengalami perubahan pada sifat dasar politik luar negeri indonesia yang bebas aktif. Untuk mewujudkan suatu kepentingan nasional (*national Interest*) pada era globalisasi sekarang ini pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus selalu diselaraskan dengan kondisi dunia internasional.

Strategi dasar politik luar negeri Indonesia yang dapat menjawab sebagian tantangan yang dihadapi serta mencerminkan kelahiran Indonesia baru yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Citra buruk yang diperoleh Indonesia membuat negeri ini makin terpuruk di dunia internasional. Untuk itu pemerintah perlu mengambil strategi-strategi yang handal untuk mengembalikan citra yang dapat menguntungkan indonesia. Dalam hal ini pemerintah juga harus membenahi keadaan dalam negeri yang dapat menimbulkan citra buruk dimata masyarakat internasional. Seperti penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menciptakan stabilitas keamanan. Hal itu akan berdampak pada kembalinya para investor asing yang telah meninggalkan Indonesia bebrapa waktu silam.

Kebijakan politik luar negeri dan strategi diplomasi konvensional yang telah dikembangkan pemerintah selama ini sudah tidak lagi memadai. Pemerintah harus mengambil terobosan-terobosan yang mutakhir dalam upaya percepatan pemulihan di tanah air. Identitas nasional yang baru, menonjolkan transformasi

politik yang telah dialami Indonesia yang membedakannya dengan era sebelumnya yang otoriter dan militeristik. Identitas Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan terbesar di kalangan dunia Muslim, dengan masyarakat plural dan Islam yang moderat serta sistem ekonomi yang sangat terbuka perlu dipromosikan secara lebih luas untuk menetralkan citra buruk yang cenderung mendominasi pemberitaan tentang Indonesia. Disamping itu menggerakkan *second track diplomacy* menjadi penting diperlukan untuk kemitraan yang lebih luas antara pemerintah dan unsur-unsur di luar pemerintah dalam melakukan hubungan internasional yang sekarang semakin diwarnai *complex interdependence* yang melibatkan banyak aktor di luar negara dan peningkatan kemampuan *public relations* secara keseluruhan serta profesionalisme kalangan diplomat. Agar politik luar negeri mencerminkan identitas dan prioritas nasional, maka nilai-nilai demokrasi dan HAM yang sekarang menjadi tema utama politik dalam negeri hendaknya turut dijadikan sebagai nilai-nilai yang mendasari politik luar negeri Indonesia di masa-masa yang akan datang.

Peningkatan hubungan kerjasama Internasional dalam proses pemulihan kondisi ekonomi dalam negeri menjadi suatu keharusan untuk menciptakan keadaan ekonomi yang sehat. Krisis multidimensi yang melanda Indonesia membuat negeri ini makin terpuruk dalam lingkungan global. Dalam peningkatan hubungan kerjasama internasional dibidang ekonomi, pemerintah memprioritaskan kepada negara-negara yang dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kerjasama regional difokuskan pada ruang lingkup

ASEAN, yang menjadi harapan besar terciptanya *ASEAN Economic Community*, yang mempersiapkan ASEAN mencapai pasar bebas. Kawasan ASEAN akan dijadikan sebagai aliran perdagangan babas, jasa, dan investasi. Disamping kerjasama regional kerjasama ekonomi sub-regional, pada tahun 2004 ini Indonesia telah memiliki empat kerjasama ekonomi sub-regional. Antara lain: *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)*; *Indonesia- Malaysia-Singapura Growth Triangle (IMS-GT)*; *Brunei Darussalam Indonesia Malaysia-The Philipines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)*; *Australia-Indonesia Development Area (AIDA)*. Kerjasama ekonomi tersebut dimaksud untuk mencari terobosan-terobosan guna membantu percepatan pemulihan ekonomi. Pada level kerjasama bilateral peran negara maju dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional sangat menentukan. Diantaranya, hubungan bilateral Indonesia – Jepang,, Indonesia – Republik Korea, Indonesia – RRC, dan Indonesia – Amerika Serikat, disamping banyak lagi hubungan-hubungan bilateral lainnya. Pada dataran multilateral Indonesia tetap meningkatkan hubungan kerjasama dengan negara-negara APEC, dan berkomitmen memajukan sistem perdagangan multilateral dan perundingan WTO sebagai wadah perdagangan multilateral. Disamping itu kerjasama OKI terus ditingkatkan untuk mempercepat rencana OKI sebagai tindakan nyata dari komitmen negara-negara anggota.

Perubahan konstelasi politik internasional memacu negara-negara di dunia untuk saling berkompetisi mengikuti perkembangan tatanan global. Era globalisasi menuntut setiap negara untuk mempersiapkan sedini mungkin agar bisa *survive* pada era yang sering diartikan sebagai *free trade era*. Indonesia

sendiri bersama negara-negara ASEAN telah menyatakan kesiapannya di tahun 2003.

Kesiapan untuk bersaing dengan negara-negara didunia tidak bisa hanya dengan ucapan semata, tetapi harus didasari dengan situasi dalam negeri yang kondusif dan berkeadilan. Peran sebuah negara pada era globalisasi sudah banyak di wakili oleh lembaga-lembaga yang bersifat *non-government* dalam melaksanakan hubungan luar negeri. Krisis yang melanda Indonesia dan sebagian negara-negara Asia lainnya telah memperlambat kesiapan Indonesia untuk ikut bersaing dengan negara-negara lain, Indonesia masih dalam tahap keluar dari krisis multidimensi yang melanda negeri ini. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada era globalisasi masih bersifat pemulihan di segala bidang serta mencari dukungan dari masyarakat internasional baik yang bersifat *government* maupun *non-government*. Krisis yang berkepanjangan serta berbagai peristiwa yang terjadi sering kali membuat negara-negara lain mengeluarkan kebijakan yang menyudutkan Indonesia pada dataran internasional. Kebijakan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pencapaian tujuan yang ingin di capai di luar negeri. Untuk itu pemerintah dituntut untuk berkerja keras dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di tanah air.